Tarikh
Journal Of Islamic History & Civilization

OPEN ACCESS
Tarikh, Vol. 2 No. 2, 2026, Page 306-330
E-ISSN: 3090-8310
DOI: https://doi.org/10.61630/tjihc.v2i2.36
tarikh.crjis.com

Paradigma Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah: Konstruksi Epistemologis dan Relevansinya bagi Pendidikan Tinggi Islam

Rizqia Ulfa[1], Muji Mulia[2]
[1.2] Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Article Info

Article History
Submitted 15-07-2026
Revised 26-08-2026
Accepted 28-09-2026
Published 30-10-2026

Keywords:
Integration-Interconnection; Amin Abdullah; Islamic Epistemology; Islamic Higher Education

Correspondence:
251003021@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This article examines the integration-interconnection paradigm of Amin Abdullah as an epistemological framework for Islamic higher education in Indonesia. Employing qualitative library research with a philosophical-historical approach, the study reads Abdullah's primary works alongside secondary literature, using Kuhn's notion of paradigm and al-Jabiri's typology of epistemic systems (bayani, burhani, irfani) as its two analytical lenses. The findings show that, first, the paradigm emerged from a specific intellectual trajectory and from a diagnosis of dichotomy as an epistemological problem. Second, the typology of epistemic systems and the three hadlarah (hadlarah al-nash, al-'ilm, and al-falsafah) are related but not identical: the former classifies ways of knowing, the latter classifies traditions of knowledge, and each hadlarah is multi-epistemic. Third, the paradigm accepts plural criteria of truth operating in different domains, yet it lacks a decision rule for competing claims on the same question. Fourth, chronology and the diversity of integration models show that the paradigm cannot be treated as the basis of the national IAIN–UIN transformation; it is better understood as an influential model developed at UIN Sunan Kalijaga. The article contributes epistemic indicators for assessing the paradigm and a conceptual framework for operationalizing it in Islamic higher education outside Java, illustrated through Aceh, which requires further empirical testing.

Artikel ini mengkaji paradigma integrasi-interkoneksi Amin Abdullah sebagai kerangka epistemologis bagi pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan kualitatif melalui pendekatan filosofis-historis, kajian ini membaca karya-karya primer Abdullah bersama literatur sekunder, dengan menggunakan konsep paradigma Kuhn dan tipologi sistem epistemik *al-Jabiri* (*bayani, burhani, irfani*) sebagai dua lensa analisis. Temuan menunjukkan bahwa, pertama, paradigma ini lahir dari lintasan intelektual tertentu dan dari diagnosis bahwa dikotomi merupakan persoalan epistemologis. Kedua, tipologi sistem epistemik dan tiga *hadlarah* (*hadlarah al-nash, al-'ilm,* dan *al-falsafah*) saling berhubungan tetapi tidak identik: yang pertama mengklasifikasikan cara mengetahui, yang kedua mengklasifikasikan tradisi keilmuan, dan setiap hadlarah bersifat multiepistemik. Ketiga, paradigma ini menerima pluralitas kriteria kebenaran yang bekerja pada ranah berbeda, tetapi belum menyediakan aturan keputusan bagi klaim yang bersaing pada pertanyaan yang sama. Keempat, kronologi dan keragaman model integrasi menunjukkan bahwa paradigma ini tidak

© 2025 by the authors; This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

dapat diperlakukan sebagai dasar transformasi nasional IAIN–UIN, ia lebih tepat dipahami sebagai model berpengaruh yang dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga. Artikel ini menawarkan indikator epistemik untuk menilai paradigma tersebut dan kerangka konseptual operasionalisasinya bagi pendidikan tinggi Islam di luar Jawa dengan ilustrasi Aceh, yang masih memerlukan pengujian empiris.

A. PENDAHULUAN

Sejarah intelektual Islam mencatat sebuah ironi besar: peradaban yang pernah melahirkan ilmuwan-ilmuwan kelas dunia seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd, dan Al-Ghazali, justru terjebak dalam dikotomi keilmuan yang berkepanjangan. Dikotomi antara ilmu agama (*'ulum al-din*) dan ilmu umum (*'ulum al-dunya*) merupakan salah satu persoalan epistemologis yang paling lama diperdebatkan dalam diskursus pendidikan Islam. Peradaban Islam klasik melahirkan pemikir dan ilmuwan seperti Ibn Sina, al-Farabi, Ibn Rushd, dan al-Ghazali yang menautkan penyelidikan agama, filsafat, dan ilmu alam. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pemisahan kedua kelompok ilmu itu mengeras dalam praktik kelembagaan pendidikan Islam pada periode berikutnya. (Mas'ud, 2002) misalnya, mengaitkan menguatnya orientasi pendidikan yang berpusat pada ilmu-ilmu agama, khususnya fikih, dengan model madrasah Nizamiyah pada abad pertengahan. Di Indonesia, persoalan ini bertemu dengan dualisme kelembagaan pendidikan yang membentuk pengalaman pendidikan tinggi Islam (Afrizal, 2022; Hanifah, 2018) Dikotomi tersebut dengan demikian perlu dipahami sebagai konstruksi historis yang berlapis, bukan sebagai watak bawaan tradisi keilmuan Islam.

Dalam konteks itulah M. Amin Abdullah, Guru Besar Filsafat Islam sekaligus mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, merumuskan paradigma integrasi-interkoneksi sebagai kerangka epistemologis untuk mendialogkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu sosial-humaniora, dan ilmu-ilmu alam (Abdullah, 2015). Gagasan ini dirumuskan antara lain dalam *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Abdullah, 1996)*, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Abdullah, 2006), serta karya terbarunya tentang pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam studi agama dan studi Islam (Abdullah, 2020). Pemikirannya yang tertuang dalam berbagai karya, khususnya konsep integrasi-interkoneksi, tidak hanya bersifat teoritis semata, melainkan telah diimplementasikan secara nyata melalui transformasi kelembagaan IAIN menjadi UIN di berbagai daerah di Indonesia (Masyitoh, 2020). Paradigma yang

ia tawarkan lahir dari keresahan mendalam terhadap dikotomi keilmuan yang dinilainya sebagai akar dari kemunduran intelektual umat Islam.

Dalam konteks global, gagasan integrasi ilmu agama dan sains bukanlah hal baru. Proyek Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang digagas Ismail Raji al-Faruqi dan Seyyed Hossein Nasr pada 1970-an dan Mehdi Golshani, hingga gagasan rekonsiliasi Nidhal Guessoum (Bigliardi, 2012). Dibandingkan dengan proyek Islamisasi ilmu yang bertolak dari kerangka tauhid untuk menata ulang ilmu-ilmu modern, Abdullah menekankan hubungan dialogis di antara disiplin yang tetap mempertahankan identitasnya masing-masing (Abdullah, 2015). Pendekatan ini relevan dengan konteks Indonesia yang memiliki tradisi keilmuan Islam tersendiri dan menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan modernitas (Fauzima & Irsyadunnas, 2026). Karena itu, paradigma ini menempati posisi tersendiri dalam peta pemikiran Islam kontemporer dan layak dikaji secara epistemologis.

Pemikiran Abdullah sendiri telah banyak dikaji dari berbagai sudut. (Siswanto, 2013) menelaah perspektif Abdullah tentang integrasi-interkoneksi dalam kajian Islam, khususnya relasi antarentitas keilmuan, tetapi kajiannya bersifat konseptual-deskriptif dan tidak menguji hubungan paradigma tersebut dengan perubahan kelembagaan. (Izudin, 2015) menganalisis epistemologi paradigma ini dalam kaitannya dengan metode studi Islam. Fokusnya pada pendekatan metodologis, sehingga pembedaan antara tipologi epistemik dan *hadlarah* serta klaim kelembagaan belum diuji. (Masyitoh, 2020) membaca paradigma ini sebagai respons terhadap dikotomi ilmu di perguruan tinggi, namun tidak membedakan secara tegas antara paradigma epistemik dan perubahan institusional. (Adib, 2022) menelaah dialog pendekatan normatif dan historis dalam studi Islam menurut Abdullah, tetapi tidak menelaah status kebenaran antar-*hadlarah* maupun operasionalisasinya pada konteks perguruan tinggi keagamaan Islam tertentu.

Kajian lain bersifat komparatif atau berorientasi pembelajaran. (Anwar, 2021) membandingkan integrasi keilmuan Abdullah dengan Imam Suprayogo, dan (Fian & Hidayat, 2023) membandingkannya dengan pemikiran Mehdi Golshani. Keduanya berfokus pada perbandingan antartokoh, bukan pada konstruksi epistemologis paradigma maupun hubungannya dengan transformasi IAIN–UIN. (Maisyanah et al., 2023) membahas relevansi pemikiran Abdullah bagi paradigma baru pembelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi pada level pembelajaran dan bukan pada konteks pendidikan tinggi di luar Jawa. (Rahmani et al., 2026) menyajikan analisis filosofis atas

paradigma ini sebagai rekonstruksi epistemologi Islam beserta implikasinya bagi pendidikan Islam. Berdasarkan abstraknya, kajian tersebut tidak tampak menguji secara kronologis hubungan paradigma dengan alih status IAIN–UIN maupun konteks di luar Jawa. Pada tataran kelembagaan, (Rifai et al., 2014) dan (Hanifah, 2018) menunjukkan keragaman model integrasi di berbagai UIN, tetapi tidak menempatkan paradigma Abdullah secara khusus. Penilaian atas keterbatasan kajian-kajian tersebut didasarkan pada fokus yang tercantum dalam judul dan abstraknya.

Pembacaan atas kajian-kajian tersebut memperlihatkan empat celah penelitian. Pertama, hubungan antara tipologi *bayani-burhani-irfani* dan tiga *hadlarah* sering diperlakukan seolah-olah satu konstruksi, padahal keduanya bekerja pada tingkat analisis yang berbeda. Kedua, analisis mengenai status wahyu, ilmu empiris, dan filsafat serta status kebenaran di antara ketiganya belum menjadi pusat kajian. Ketiga, hubungan antara paradigma tersebut dan transformasi IAIN menjadi UIN lebih sering diasumsikan daripada diuji secara kronologis dan dokumenter, padahal kajian (Hanifah, 2018) menunjukkan bahwa UIN di Indonesia mengembangkan model integrasi yang berbeda-beda. Keempat, relevansi paradigma ini jarang dibaca pada konteks perguruan tinggi keagamaan Islam di luar Jawa yang memiliki basis sosial-keagamaan berbeda.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan artikel ini dinyatakan sebagai empat temuan analitis yang dibuktikan pada bagian pembahasan: (1) pembedaan antara tipologi sistem epistemik dan *hadlarah* beserta pola hubungannya (Tabel 1); (2) analisis status wahyu, ilmu empiris, dan filsafat serta kriteria kebenaran masing-masing, termasuk batas penerapan paradigma (Tabel 3); (3) pembedaan antara proses nasional alih status IAIN–UIN dan kontribusi Abdullah di UIN Sunan Kalijaga berdasarkan kronologi dan indikator epistemik (Tabel 4); serta (4) kerangka operasionalisasi bagi perguruan tinggi keagamaan Islam di luar Jawa dengan ilustrasi Aceh (Tabel 6). Tujuan artikel ini adalah menganalisis konstruksi epistemologis paradigma tersebut, unsur-unsur pembentuknya, dan relevansinya bagi pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Tujuan itu dijabarkan dalam tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana latar intelektual dan historis membentuk paradigma integrasi-interkoneksi Abdullah; (2) bagaimana konstruksi epistemologis paradigma tersebut, termasuk hubungan antara tipologi sistem epistemik dan *hadlarah* serta status kebenaran di antara keduanya; dan (3) bagaimana relevansi dan batas klaim paradigma tersebut bagi pendidikan tinggi Islam di Indonesia, termasuk di luar Jawa.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) (Fadli, 2021; Zed, 2004). Metode ini dipilih karena objek kajian berupa pemikiran seorang tokoh intelektual yang tersebar dalam berbagai karya tulis. Penelitian ini menggunakan satu pendekatan, yakni pendekatan filosofis-historis, untuk menelusuri bagaimana gagasan Abdullah terbentuk dalam konteks intelektual dan historis tertentu serta bagaimana struktur argumennya disusun. Deskripsi dan analisis kritis dipahami sebagai tahapan kerja dalam pendekatan ini, bukan sebagai pendekatan yang terpisah.

2. Kerangka Teoretis

Analisis dipandu oleh dua teori. Pertama, konsep paradigma (Kuhn, 2012), yang memahami paradigma sebagai komitmen bersama suatu komunitas ilmiah yang mencakup asumsi dasar, nilai, metode, dan contoh-contoh praktik yang diakui. Konsep ini digunakan untuk membedakan perubahan paradigma keilmuan dari perubahan administratif suatu lembaga. Kedua, tipologi sistem pengetahuan *bayani*, *burhani*, dan *irfani* dari Muhammad Abid al-Jabiri sebagaimana dikaji dalam literatur berbahasa Indonesia (Rouf, 2018), yang juga menjadi salah satu rujukan Abdullah dalam merumuskan epistemologinya. Teori ini digunakan untuk membedah struktur epistemik paradigma integrasi-interkoneksi.

3. Sumber Data dan Kriteria Pemilihan

Sumber primer terdiri atas karya-karya Abdullah yang seluruhnya tercantum dalam daftar pustaka, yaitu *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (1996), *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (2006), artikel "*Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science*" (2014), serta *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer* (2020). Keempat karya ini dipilih karena mewakili fase perumusan masalah (1996), perumusan paradigma (2006), perumusan kerangka sains-agama-budaya (2014), dan pengembangan metodologis (2020). Sumber sekunder meliputi artikel jurnal dan buku yang membahas pemikiran Abdullah, implementasi integrasi keilmuan di perguruan tinggi keagamaan Islam, serta teori yang digunakan. Sumber kelembagaan meliputi dokumen peraturan dan laman resmi universitas.

Kriteria pemilihan sumber sekunder adalah: (a) membahas secara langsung pemikiran Abdullah atau implementasi integrasi keilmuan di perguruan tinggi keagamaan Islam; (b) diterbitkan pada rentang 2013–2026 dengan identitas publikasi yang dapat ditelusuri melalui DOI atau tautan resmi; dan (c) relevan dengan salah satu kategori analisis. Sumber yang identitas publikasinya tidak dapat diverifikasi dikeluarkan. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data jurnal nasional dan internasional (Google Scholar, Garuda, DOAJ) serta repositori perguruan tinggi, dengan kata kunci "Amin Abdullah", "integrasi-interkoneksi", "*hadlarah*", "*bayani burhani irfani*", "*spider web*", dan "transformasi IAIN UIN". Hasil penelusuran disaring melalui tiga tahap, yakni judul, abstrak, dan teks lengkap.

4. Prosedur dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi kualitatif tematik atas teks primer dan sekunder, yang dilaksanakan dalam lima tahap. Tahap pertama adalah inventarisasi dan seleksi sumber. Tahap kedua adalah pembacaan teks primer dan pengodean tematik ke dalam empat kategori: (i) diagnosis problem dikotomi, (ii) basis epistemik (tipologi bayani-burhani-irfani dan tiga *hadlarah*), (iii) struktur model jaring laba-laba, dan (iv) implikasi kelembagaan dan kurikuler. Tahap ketiga adalah interpretasi setiap kategori dengan dua teori di atas, termasuk perbandingan konsep antarkategori untuk membedakan konstruksi yang berdekatan. Tahap keempat adalah pembedaan antara fakta kelembagaan yang didukung dokumen dan interpretasi mengenai pengaruh paradigma. Tahap kelima adalah penarikan kesimpulan yang hanya didasarkan pada temuan yang dapat ditunjukkan dari sumber.

Keabsahan data dijaga melalui tiga bentuk triangulasi yang sesuai dengan karakter penelitian kepustakaan. Pertama, triangulasi sumber, yakni membandingkan klaim sumber sekunder dengan teks primer dan memeriksa fakta kelembagaan pada dokumen resmi. Kedua, triangulasi teori, yakni menafsirkan data yang sama dengan dua teori yang berbeda (Kuhn dan al-Jabiri) untuk melihat konsistensi atau ketegangan hasil. Ketiga, triangulasi kronologis, yakni membandingkan karya primer dari fase yang berbeda (1996, 2006, 2014, 2020) untuk menguji konsistensi dan perkembangan gagasan. Selain itu, setiap klaim ditautkan pada sumber yang dapat ditelusuri. Keterbatasan kajian ini adalah tidak adanya data lapangan, sehingga simpulan mengenai implementasi bersifat konseptual dan tentatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lintas Intelektual dan Konteks Historis Paradigma

Muhammad Amin Abdullah lahir di Margomulyo, Tayu, Pati, Jawa Tengah, pada 28 Juli 1953. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di lingkungan pesantren, sebelum melanjutkan studi sarjana di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perjalanan intelektualnya mencapai titik penting ketika ia berhasil meraih gelar Ph.D. dalam bidang Filsafat Islam dari Universitas Hacettepe, Ankara, Turki pada tahun 1990. Pengalaman belajar di Turki ini memberi Abdullah perspektif yang unik: ia menyaksikan langsung bagaimana sebuah negara Muslim berupaya mengelola relasi antara modernitas dan tradisi keislaman, pengalaman yang kemudian banyak memengaruhi pembentukan pemikirannya (Waston, 2016). Ia kemudian menjalani studi lanjutan di McGill University, Kanada, pada 1997–1998 (Siswanto, 2013).

Secara analitis, lintasan tersebut dapat dibaca sebagai tiga lapisan pembentuk yang kelak tercermin dalam struktur paradigmanya. Pertama, pendidikan pesantren dan IAIN membekali Abdullah dengan penguasaan tradisi teks keislaman klasik yang, dalam tipologi al-Jabiri, berada pada ranah epistemologi bayani (Rouf, 2018). Kedua, studi filsafat di Turki mempertemukannya dengan pengalaman negara Muslim yang bergulat dengan hubungan antara modernitas dan tradisi (Waston, 2016), dan melatih nalar filosofis yang kritis. Ketiga, paparan terhadap studi agama di forum akademik internasional memperkenalkan perangkat hermeneutika, fenomenologi, dan studi agama komparatif (Siswanto, 2013). Perpaduan tiga lapisan ini membantu menjelaskan mengapa paradigma yang ia rumuskan menempatkan teks, ilmu, dan filsafat dalam satu kerangka dialog. Penjelasan ini merupakan interpretasi penulis, bukan pernyataan eksplisit Abdullah mengenai asal-usul gagasannya.

Konteks historisnya adalah pendidikan tinggi Islam pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an, ketika IAIN menghadapi tantangan berupa kurikulum yang berfokus pada ilmu-ilmu agama, keterbatasan daya saing lulusan, dan keterbatasan respons terhadap isu-isu kontemporer (Afrizal, 2022). Judul karya awalnya, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Abdullah, 1996), sudah memperlihatkan inti persoalan yang ia hadapi, yaitu ketegangan antara pendekatan normatif-teologis dan pendekatan historis-empiris dalam memahami agama. Dikotomi ini, menurutnya, bukan merupakan warisan asli Islam, melainkan produk sejarah yang muncul akibat konflik antara dunia Islam dengan Barat sejak era kolonialisme. Abdullah berpendapat bahwa untuk membangkitkan kembali kejayaan peradaban Islam, umat

Islam harus melampaui dikotomi tersebut dan membangun paradigma keilmuan yang integratif dan inklusif (Nusi, 2021). Dalam kerangka (Kuhn, 2012), ketegangan semacam ini dapat dibaca sebagai anomali yang tidak lagi tertangani oleh kerangka lama, sehingga membuka ruang bagi perumusan paradigma baru. Perlu dicatat pula bahwa Abdullah berperan ganda sebagai perumus gagasan dan pimpinan institusi. Peran ganda ini membuat pengaruh pribadinya pada kebijakan kelembagaan di UIN Sunan Kalijaga lebih mudah ditelusuri, tetapi tidak otomatis dapat digeneralisasi pada lembaga lain.

2. Konstruksi Epistemologis: Tipologi Sistem Epistemik dan *Hadlarah*

Abdullah memetakan relasi antardisiplin ke dalam tiga model: entitas tunggal yang merasa paling benar, entitas-entitas yang terisolasi dan tidak saling menyapa, serta entitas-entitas yang saling terkait (*interconnected entities*) yang menyadari keterbatasan disiplinnya masing-masing sehingga bersedia bekerja sama (Abdullah, 2006; Siswanto, 2013). Model ketiga inilah yang menjadi dasar paradigma integrasi-interkoneksi. Rumusan ini menunjukkan bahwa interkoneksi bukan penggabungan mekanis agama dan sains, melainkan sikap epistemik yang mengakui batas dan sekaligus kebutuhan setiap disiplin akan disiplin lain (Fauzima & Irsyadunnas, 2026).

Pada tingkat basis pengetahuan, Abdullah mengidentifikasi tiga sistem epistemologi dasar dalam tradisi keilmuan Islam yang harus didialogkan. Pertama, epistemologi *bayani*, yaitu cara memperoleh pengetahuan yang bertumpu pada teks (*nash*) Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, epistemologi *irfani*, yang menyandarkan pengetahuan pada pengalaman spiritual, intuisi, dan *kasyf* (penyingkapan). Ketiga, epistemologi *burhani,* yang menggunakan akal dan logika sebagai landasan utama perolehan pengetahuan. Tipologi ini berakar pada pembacaan al-Jabiri atas formasi nalar Arab (Rouf, 2018). Dalam pandangan Abdullah, ketiga epistemologi ini tidak boleh dipahami secara eksklusif dan terpisah satu sama lain, melainkan harus saling berdialog dan melengkapi. Monoperspektif terhadap salah satu epistemologi saja akan menghasilkan pemahaman yang parsial dan berpotensi melahirkan sikap eksklusivisme intelektual (Abdullah, 2006; Masyitoh, 2020).

Selain tipologi tersebut, Abdullah menggunakan konsep tiga *hadlarah* (peradaban keilmuan): *hadlarah al-nash*, yakni tradisi teks keagamaan; *hadlarah al-'ilm*, yakni tradisi ilmu empiris; dan *hadlarah al-falsafah*, yakni tradisi filsafat yang bersifat etik-kritis (Abdullah, 2015). Dalam pembacaan (Abdullah, 2020), ketiganya dapat dipetakan pada tiga dimensi, yaitu subjektif (agama), objektif (sains), dan

intersubjektif (filsafat), sehingga filsafat berfungsi sebagai jembatan dialog antara dua hadlarah lainnya. Abdullah menekankan bahwa ketiga hadlarah ini harus saling berinteraksi dalam hubungan yang bersifat semipermeable, artinya masing-masing tetap mempertahankan identitasnya namun terbuka untuk menerima masukan dari yang lain (Arbi et al., 2024).

Pertanyaan yang perlu dijawab secara tegas adalah apakah kedua konstruksi ini identik. Pembacaan dalam artikel ini menyatakan bahwa keduanya berhubungan tetapi tidak identik, karena bekerja pada tingkat analisis yang berbeda. Tipologi bayani-burhani-irfani menjawab pertanyaan *bagaimana pengetahuan diperoleh dan dibenarkan*, sehingga ia merupakan klasifikasi sistem epistemik. *Hadlarah* menjawab pertanyaan *dalam tradisi dan komunitas keilmuan mana pengetahuan itu hidup dan dengan siapa ia berdialog*, sehingga ia merupakan klasifikasi formasi keilmuan yang mencakup korpus, komunitas, dan praktik. Tabel 1 merinci perbedaan tersebut.

Tabel 1. Perbedaan dan Hubungan Tipologi Sistem Epistemik dengan Hadlarah

Aspek	Bayani – Burhani – 'Irfani	Hadlarah al-Nash – al-'Ilm – al-Falsafah
Tingkat analisis	Sistem epistemik: cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan.	Formasi tradisi keilmuan: korpus, komunitas, dan praktik.
Pertanyaan kunci	Bagaimana pengetahuan diperoleh dan dibenarkan?	Dalam tradisi mana pengetahuan dihasilkan dan dengan komunitas apa ia berdialog?
Rujukan utama dalam artikel ini	Al-Jabiri sebagaimana dikaji (Abdullah, 2006; Rouf, 2018)	(Abdullah, 2015, 2020)
Fungsi dalam paradigma	Basis epistemik yang perlu saling ditegur-sapakan.	Arena dialog antartradisi ilmu.
Pola hubungan (analisis penulis)	Setiap sistem epistemik dapat bekerja di lebih dari satu hadlarah.	Setiap hadlarah didominasi satu sistem epistemik, tetapi bersifat multiepistemik.
Risiko bila disamakan	Tradisi teks dipersempit menjadi bayani dan ilmu empiris menjadi burhani.	Dialog dibayangkan hanya antarlabel, bukan antarcara mengetahui.

Sumber: olahan penulis dari (Abdullah, 2006, 2015, 2020) dan (Rouf, 2018).

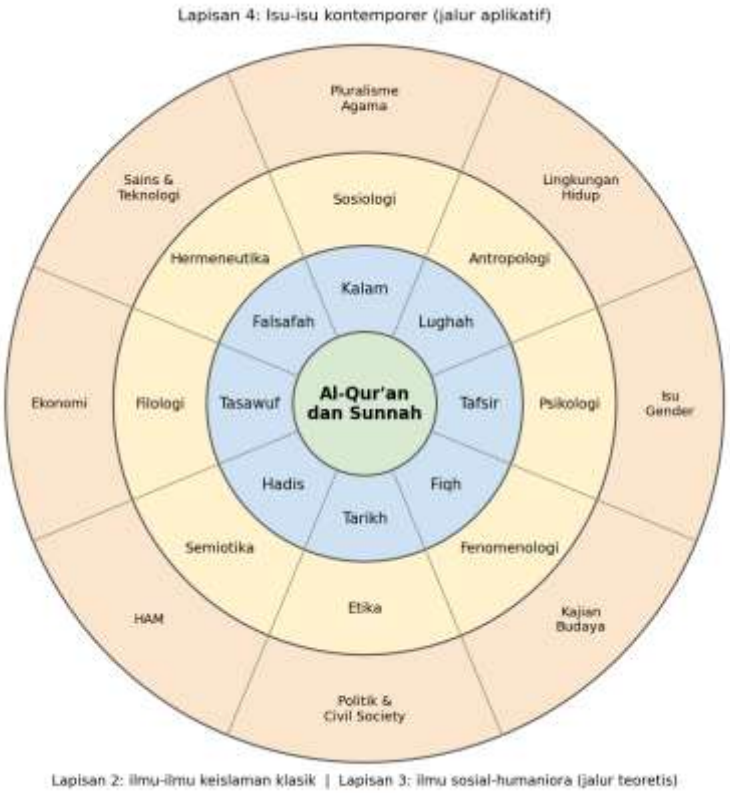
Ketidakidentikan tampak pada tiga hal. Pertama, *hadlarah al-nash* tidak dapat direduksi pada *bayani*, sebab tradisi teks keislaman sendiri memuat tasawuf (yang dalam tipologi berkaitan dengan *irfani*) serta kalam dan falsafah (yang memuat argumentasi rasional), sebagaimana terlihat pada lapisan kedua model jaring laba-laba. Kedua, *hadlarah al-'ilm* tidak sekadar burhani karena mencakup pula institusi, komunitas, dan etos ilmu modern. Ketiga, *hadlarah al-falsafah* tidak identik dengan burhani; fungsinya sebagai jembatan etik-kritis dan intersubjektif menuntut nalar demonstratif sekaligus refleksi atas nilai dan asumsi. Dengan demikian pemetaan yang paling aman adalah pemetaan dominasi, bukan kesamaan: tiap hadlarah didominasi oleh satu sistem epistemik tertentu tetapi bersifat multiepistemik. Pemetaan dominasi ini merupakan interpretasi analitis penulis.

Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi. Tipologi menyediakan "tata bahasa" epistemik, sedangkan hadlarah menyediakan "peta" tradisi tempat tata bahasa itu dipraktikkan. Dialog antar-*hadlarah* baru bermakna apabila para pelakunya menyadari sistem epistemik apa yang sedang bekerja pada setiap klaim. Dialog dalam paradigma ini karenanya berlangsung pada dua tingkat sekaligus, yaitu antarsistem epistemik dan antartradisi keilmuan.

Dibaca dengan konsep paradigma (Kuhn, 2012), tipologi dan hadlarah berfungsi sebagai komitmen bersama yang menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah, sedangkan model jaring laba-laba, yang dibahas pada subbagian berikut, berfungsi sebagai contoh model yang memandu praktik keilmuan. Struktur ini membedakan paradigma integrasi-interkoneksi dari proyek Islamisasi ilmu yang cenderung menempatkan kerangka Islam sebagai penata ulang ilmu-ilmu modern. Pada Abdullah, ilmu agama tidak memiliki otoritas untuk menentukan kebenaran ilmu empiris, dan sebaliknya ilmu empiris tidak dapat mengklaim bebas dari pertimbangan nilai dan etika (Abdullah, 2015; Tajuddin et al., 2021).

3. Model Jaring Laba-Laba Keilmuan Islam

Untuk memvisualisasikan paradigmanya, Amin Abdullah mengembangkan apa yang ia sebut sebagai "model jaring laba-laba keilmuan Islam" (*spider web model*). Model ini menggambarkan struktur keilmuan Islam dalam empat lapisan konsentris yang saling terhubung (Abdullah, 2006). Gambar 1 berikut menyajikan ulang model tersebut berdasarkan deskripsi (Abdullah, 2006) dan (Siswanto, 2013).



Gambar 1. Model Jaring Laba-Laba Keilmuan Islam (diolah ulang oleh penulis)
Sumber: disusun ulang oleh penulis berdasarkan deskripsi (Abdullah, 2006) dan (Siswanto, 2013).

Lapisan pertama dan terdalam adalah inti keilmuan Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama. Lapisan kedua memuat ilmu-ilmu keislaman klasik, yaitu kalam, falsafah, tasawuf, hadis, tarikh, fikih, tafsir, dan lughah. Lapisan ketiga adalah jalur pengetahuan teoretis yang memuat ilmu sosial dan humaniora, seperti sosiologi, hermeneutika, filologi, semiotika, etika, fenomenologi, psikologi, dan antropologi. Lapisan keempat (terluar), merupakan jalur aplikatif yang memuat isu-isu-isu kontemporer seperti pluralisme agama, sains dan teknologi, ekonomi, hak asasi manusia, politik dan *civil society*, kajian budaya, isu gender, dan lingkungan hidup. Penempatan isu-isu kontemporer di lapisan terluar ini memiliki makna penting: ia menunjukkan bahwa keilmuan Islam harus mampu menjangkau dan merespons isu-isu nyata yang dihadapi masyarakat modern, bukan terkungkung dalam diskursus internal yang tidak bersentuhan dengan realitas kehidupan. Hal inilah yang menjadikan paradigma Abdullah bersifat transformatif, bukan hanya akademis. Tabel 2 menafsirkan fungsi epistemik tiap lapisan.

Tabel 2. Fungsi Epistemik Setiap Lapisan Model Jaring Laba-Laba

Lapisan	Isi	Fungsi epistemik (analisis penulis)	Hadlarah yang dominan
1 (inti)	Al-Qur'an dan Sunnah	Sumber normatif yang menjadi titik tolak penafsiran	Hadlarah al-nash
2	Kalam, falsafah, tasawuf, hadis, tarikh, fikih, tafsir, lughah	Disiplin yang mengolah dan menafsirkan sumber secara tradisional	Hadlarah al-nash dengan irisan al-falsafah
3	Sosiologi, hermeneutika, filologi, semiotika, etika, fenomenologi, psikologi, antropologi	Perangkat teoretis-metodologis untuk membaca teks dan konteks secara historis-empiris	Hadlarah al-'ilm dan al-falsafah
4	Pluralisme agama, sains dan teknologi, ekonomi, HAM, politik, budaya, gender, lingkungan	Medan uji dan penerapan ketika keilmuan Islam berhadapan dengan persoalan nyata	Ketiga hadlarah berinteraksi

Sumber: olahan penulis dari (Abdullah, 2006) dan (Siswanto, 2013).

Ada tiga hal yang dapat dianalisis dari model ini. Pertama, inti model bukanlah ruang tertutup. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber, tetapi penafsirannya berlangsung melalui lapisan kedua dan ketiga, sehingga ilmu-ilmu sosial-humaniora diposisikan sebagai perangkat pembacaan, bukan pelengkap yang dipasang dari luar. Kedua, batas antarlapisan bersifat semipermeabel dan arah pengaruhnya tidak linear atau hierarkis. Setiap lapisan dapat memengaruhi dan dipengaruhi lapisan lain (Anwar, 2021), yang menjelaskan mengapa Abdullah menyebut hubungan ini sebagai *"teoantroposentris-integralistik"*. Kata "*teo"* merujuk pada dimensi ketuhanan yang menjadi inti semua keilmuan Islam; "antropo" merujuk pada dimensi kemanusiaan yang menjadi tujuan dan konteks semua ilmu; sedangkan "sentris-integralistik" menunjukkan bahwa semua elemen tersebut bergerak secara terpadu dan saling mendukung. Hubungan antar-lapisan dalam jaring laba-laba ini tidak bersifat hierarkis atau linear, melainkan multidireksional: setiap lapisan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lapisan lainnya. Inilah yang membuat model ini lebih dinamis dan adaptif dibandingkan model keilmuan Islam yang lebih konvensional (Anwar, 2021).

4. Wahyu, Ilmu Empiris, Filsafat, dan Status Kebenaran: Analisis Epistemologis

Karena paradigma ini bertumpu pada dialog tiga *hadlarah*, pertanyaan epistemologis yang menentukan adalah apa status masing-masing sumber pengetahuan, kriteria kebenaran apa yang berlaku di dalamnya, dan bagaimana klaim yang berbeda ditimbang ketika berjumpa. Bagian ini menganalisis ketiganya berdasarkan teks primer dan kerangka teoretis yang digunakan.

Pertama, status wahyu. Dalam kerangka Abdullah, wahyu sebagai sumber ilahi perlu dibedakan dari pemahaman manusia atas wahyu. Tema normativitas dan historisitas (Abdullah, 1996; Adib, 2022) menunjukkan bahwa agama pada tataran normatif berkaitan dengan wahyu, sedangkan agama sebagaimana dipahami dan dipraktikkan berkaitan dengan konteks bahasa, sejarah, dan sosial. Pembedaan ini membuka ruang bagi ilmu-ilmu sosial-humaniora tanpa menggugat otoritas wahyu: yang diuji historisitasnya adalah penafsiran dan praktik, bukan sumber normatif itu sendiri.

Kedua, status ilmu empiris. Ilmu empiris menghasilkan klaim yang dapat diuji melalui observasi dan terbuka untuk direvisi, sebagaimana tampak dalam gambaran (Kuhn, 2012) tentang perkembangan ilmu. Oleh karena itu, ilmu empiris unggul dalam menjelaskan mekanisme dan konteks, tetapi tidak dapat menentukan klaim normatif tentang tujuan hidup dan nilai. Dalam arah sebaliknya, ilmu agama tidak berwenang menentukan kebenaran ilmu empiris (Abdullah, 2015).

Ketiga, status filsafat. Filsafat menempati dimensi intersubjektif (Abdullah, 2020): ia menguji koherensi argumen, menyingkap asumsi yang tersembunyi, dan menimbang implikasi etis dari klaim agama maupun sains. Dalam model Abdullah, peran ini menjadikan filsafat sebagai mediator di antara dua hadlarah lain. Tabel 3 merangkum perbedaan sumber otoritas dan kriteria kebenaran ketiga hadlarah.

Tabel 3. Sumber Otoritas, Kriteria Kebenaran, dan Mekanisme Koreksi Tiga Hadlarah

Hadlarah	**Sumber otoritas**	**Kriteria kebenaran**	**Sifat klaim**	**Mekanisme koreksi**
Al-nash	Teks Al-Qur'an dan Hadis serta otoritas penafsiran.	Kesesuaian penafsiran dengan teks, kaidah, dan konteks.	Normatif; penafsiran terbuka.	Kritik metodologis dan historis atas penafsiran.

Hadlarah	Sumber otoritas	Kriteria kebenaran	Sifat klaim	Mekanisme koreksi
Al-'ilm	Observasi, data, dan komunitas ilmiah.	Verifikasi atau falsifikasi dan replikasi.	Deskriptif-eksplanatif; dapat direvisi.	Falsifikasi, replikasi, dan pergeseran paradigma.
Al-falsafah	Argumen rasional dan dialog intersubjektif.	Koherensi logis, kejelasan asumsi, dan keterpertanggungjawaban publik.	Evaluatif dan intersubjektif.	Kritik asumsi dan penyingkapan implikasi etis.

Sumber: analisis penulis berdasarkan (Abdullah, 1996, 2015, 2020) dan (Kuhn, 2012).

Pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa paradigma ini tidak menyatukan kriteria kebenaran ke dalam satu skala tunggal. Ia menerima pluralitas kriteria yang bekerja pada ranah berbeda dan mengusulkan mekanisme saling mengoreksi pada batas ranah. Posisi ini berbeda dari reduksionisme saintifik yang hanya mengakui verifikasi empiris, dan dari tekstualisme yang hanya mengakui otoritas teks.

Persoalannya, paradigma ini belum menjawab apa yang terjadi ketika klaim hadlarah al-nash dan hadlarah al-'ilm bersaing pada pertanyaan yang sama, misalnya tentang penjelasan suatu fenomena alam. Filsafat memang ditempatkan sebagai mediator, tetapi mediasi itu belum disertai aturan keputusan. Akibatnya, kemungkinan penerapan paradigma lebih kuat pada ranah ketika ketiga hadlarah menjawab pertanyaan yang berbeda tentang objek yang sama, seperti bencana, kesehatan, atau lingkungan, yang masing-masing menyangkut nilai, mekanisme, dan implikasi etis. Penerapannya lebih lemah ketika klaim bersaing pada pertanyaan yang sama.

Dengan demikian, kemungkinan penerapan paradigma ini mencakup koreksi timbal balik atas klaim yang melampaui ranahnya, perancangan penelitian yang melibatkan lebih dari satu hadlarah, dan penyusunan kerangka etis bagi perkembangan sains dan teknologi. Batasnya adalah ia tidak menyediakan prosedur adjudikasi bagi klaim yang bersaing, tidak otomatis menjamin sikap moderat, dan bergantung pada kesiapan komunitas akademik yang menjalankannya.

5. Paradigma dan Transformasi IAIN-UIN: Menimbang Hubungan Historis dan Kausalnya

Salah satu bukti paling nyata dari pengaruh paradigma integrasi-interkoneksi Amin Abdullah adalah implementasinya dalam transformasi kelembagaan pendidikan

tinggi Islam di Indonesia. Klaim bahwa paradigma integrasi-interkoneksi menjadi dasar transformasi IAIN menjadi UIN perlu dipisahkan dari klaim tentang kontribusi Abdullah bagi UIN Sunan Kalijaga. Pemisahan ini dapat dibedakan pada tiga tingkat. Tingkat pertama adalah proses nasional alih status, yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah, kesiapan kelembagaan, dan dinamika lokal tiap institusi. Tingkat kedua adalah perumusan paradigma integrasi-interkoneksi di UIN Sunan Kalijaga, yang merupakan kontribusi langsung Abdullah, di mana Amin Abdullah pernah menjabat sebagai Rektor, menjadi laboratorium pertama penerapan paradigma ini secara sistematis dan menyeluruh. Pembukaan berbagai program studi ilmu umum seperti Sains, Teknik, Kedokteran, dan Ilmu Sosial di UIN merupakan wujud nyata dari prinsip integrasi-interkoneksi (Munthe, 2022). Tingkat ketiga adalah difusi paradigma tersebut ke lembaga lain, yang belum terbukti dalam sumber-sumber yang dikaji.

Proses transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) yang berlangsung sejak awal 2000-an merupakan ekspresi institusional dari paradigma yang ia kembangkan. Kronologi menunjukkan mengapa pemisahan ini diperlukan. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berubah menjadi UIN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002 (Hidayatullah, n.d.). Dua tahun kemudian, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berubah menjadi UIN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004, bersamaan dengan perubahan STAIN Malang menjadi UIN Malang (Kalijaga, n.d.). IAIN Ar-Raniry kemudian berubah menjadi UIN Ar-Raniry berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013. Transformasi yang pertama berlangsung di lembaga lain dan lebih dahulu, sehingga tidak dapat dijelaskan semata oleh paradigma Abdullah. (Hanifah, 2018) juga memperlihatkan bahwa konsep integrasi keilmuan berbeda pada setiap UIN: integrasi ilmu agama dan ilmu umum di UIN Jakarta, jaring laba-laba di UIN Yogyakarta, pohon ilmu di UIN Malang, roda pedati di UIN Bandung, dan *integrated twin towers* di UIN Surabaya. (Rifai et al., 2014) menegaskan bahwa transformasi IAIN menjadi UIN tidak dapat dilepaskan dari harapan akan integrasi keilmuan, tetapi implementasinya pada kurikulum dan pembelajaran perlu dievaluasi tersendiri.

Dari sisi jumlah, data seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang dirilis pada 2025 menunjukkan bahwa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah Kementerian Agama terdiri atas 30 UIN, 23 IAIN, dan 5 STAIN (JPNN, 2025). Jumlah ini dinamis karena alih status lembaga masih berlangsung, dan data ini hanya menunjukkan sebaran kelembagaan, bukan dampak paradigma. Temuan-temuan di

atas mengarahkan pada kesimpulan yang lebih hati-hati: paradigma Abdullah lebih tepat dipandang sebagai salah satu model integrasi yang berpengaruh, terutama di UIN Sunan Kalijaga, dan bukan satu-satunya landasan transformasi kelembagaan nasional. Pembuktian pengaruh yang lebih luas memerlukan penelusuran dokumen kebijakan dan naskah akademik alih status pada tiap lembaga.

Argumen yang lebih mendasar menyangkut indikator. Pembukaan program studi umum, misalnya sains, teknik, atau kedokteran, tidak dapat langsung dibaca sebagai dampak paradigma, karena lembaga yang telah berstatus universitas memang memperoleh kewenangan kelembagaan untuk membuka program studi tersebut. Program studi umum adalah konsekuensi status hukum, sedangkan paradigma, dalam arti (Kuhn, 2012), terletak pada komitmen bersama komunitas akademik mengenai cara memandang dan menghubungkan ilmu. Perubahan ini sejalan dengan visi Abdullah bahwa universitas Islam ideal adalah lembaga yang tidak membatasi dirinya hanya pada ilmu-ilmu keagamaan, tetapi mampu mengintegrasikan seluruh disiplin ilmu dalam kerangka nilai dan etika Islam. Sehingga, UIN bukan sekadar "IAIN plus ilmu umum", melainkan sebuah institusi dengan paradigma keilmuan yang berbeda secara kualitatif (Hasan et al., 2023). Dengan demikian, paradigma integrasi-interkoneksi lebih tepat dinilai dari pandangan keilmuan dan praktik akademik suatu lembaga dalam menghadapi fenomena sosial. Tabel 5 membedakan indikator kelembagaan, yang perlu tetapi tidak cukup, dari indikator epistemik.

Tabel 4. Indikator Kelembagaan dan Indikator Epistemik Integrasi-Interkoneksi

Dimensi	**Indikator kelembagaan (perlu, tidak cukup)**	**Indikator epistemik (menunjukkan pergeseran paradigma)**
Kurikulum	Adanya program studi umum dan mata kuliah lintas fakultas.	Capaian pembelajaran dan bahan ajar yang secara eksplisit menghubungkan sumber normatif dengan perangkat ilmu sosial atau ilmu alam.
Riset	Adanya pusat studi atau skema hibah interdisipliner.	Rumusan masalah, kerangka teori, dan metode yang memadukan lebih dari satu hadlarah dalam satu desain penelitian.

Dimensi	Indikator kelembagaan (perlu, tidak cukup)	Indikator epistemik (menunjukkan pergeseran paradigma)
Pengajar	Rekrutmen dosen dari berbagai latar disiplin.	Praktik pengajaran lintas disiplin dan kesadaran akan keterbatasan disiplin sendiri.
Tata kelola	Perubahan nama, status, dan struktur fakultas.	Visi keilmuan yang dijadikan acuan penilaian mutu akademik, bukan hanya dokumen administratif.

Sumber: olahan penulis berdasarkan pembedaan paradigma dan kelembagaan (Kuhn, 2012) dan model interconnected entities (Abdullah, 2006).

Kasus UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat memperjelas pembedaan ini. Perubahan status tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 yang berlaku sejak 1 Oktober 2013 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013). Kajian evaluatif atas kesiapan perubahan status tersebut menitikberatkan pada kualifikasi program studi, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar dan tenaga administrasi, serta sarana-prasarana (Ibrahim, 2015). Dengan kata lain, kesiapan yang dinilai adalah kesiapan kelembagaan. Sejauh mana perubahan itu juga merupakan perubahan epistemik, sebagaimana diukur oleh indikator pada Tabel 4, berada di luar cakupan kajian tersebut dan merupakan agenda penelitian lanjutan. Hambatan implementasi yang dicatat literatur, yakni kesiapan sumber daya pengajar dan kurikulum yang belum sepenuhnya mencerminkan semangat integrasi (Afrizal, 2022), serta koeksistensi paralel antara ilmu agama dan ilmu umum tanpa dialog (Maisyanah et al., 2023), menunjukkan bahwa perubahan nama dan penambahan program studi belum menjamin perubahan paradigma.

6. Kritik: Kekuatan, Keterbatasan, dan Problem Epistemologis

Penilaian kritis atas paradigma ini perlu dimulai dari kekuatannya. Pertama, paradigma ini memiliki ketajaman diagnosis, karena mengidentifikasi dikotomi sebagai persoalan epistemologis, yakni ketegangan antara normativitas dan historisitas (Abdullah, 1996). Kedua, model *interconnected entities* mempertahankan identitas setiap disiplin sambil menuntut keterbukaan timbal balik, sehingga menghindari dominasi satu kerangka atas kerangka lain (Abdullah, 2006; Siswanto, 2013). Ketiga, struktur jaring laba-laba menempatkan ilmu sosial-humaniora sebagai perangkat pembacaan teks dan konteks, sehingga membuka jalan bagi studi Islam yang

kritis. Keempat, paradigma ini cukup fleksibel untuk dijadikan rujukan perancangan kurikulum dan pembelajaran (Maisyanah et al., 2023; Rifai et al., 2014).

Di sisi lain, pembacaan analitis menunjukkan enam isu kritis. Masing-masing membawa implikasi bagi posisi epistemologis paradigma ini, dan ringkasannya disajikan pada Tabel 5.

Isu pertama adalah abstraksi dan operasionalisasi. Model jaring laba-laba menjelaskan relasi antardisiplin, tetapi belum menyediakan prosedur baku untuk menghubungkan, misalnya, tafsir dengan sosiologi dalam satu desain pembelajaran atau penelitian. Dalam kerangka (Kuhn, 2012), paradigma yang matang tidak hanya memuat kerangka konseptual, tetapi juga contoh-contoh praktik yang dapat diteladani. Implikasinya, paradigma ini lebih tepat disebut kerangka epistemologis-reflektif ketimbang metode kerja yang siap pakai. Karya terbaru (Abdullah, 2020) tentang pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dapat dibaca sebagai upaya mengisi kebutuhan metodologis tersebut, dan sejauh mana ia menjawab keberatan operasionalisasi memerlukan telaah lanjutan terhadap penerapannya.

Isu kedua adalah kemungkinan dialog setara antar-epistemologi. Dialog yang setara tampak sulit dibayangkan ketika teks, secara normatif, dianggap berotoritas tertinggi dalam tradisi Islam. Persoalan ini dapat dijernihkan dengan prinsip semipermeabel dan pembedaan normativitas dan historisitas (Abdullah, 1996). Otoritas teks dipertahankan pada ranah normatif, sementara pembacaan atas konteks historis, sosial, dan empiris terbuka bagi ilmu-ilmu lain. Implikasinya, kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan dalam kesediaan saling mengoreksi pada ranah masing-masing, bukan kesetaraan otoritas pada semua ranah. Rumusan inilah yang perlu dipertegas agar paradigma tidak dibaca sebagai relativisme epistemik.

Isu ketiga adalah tegangan antara penempatan Al-Qur'an dan Sunnah di pusat model dan klaim bahwa relasi antarlapisan tidak hierarkis. Posisi di pusat dapat dibaca sebagai sumber nilai dan orientasi, bukan keunggulan epistemik atas ilmu empiris. Namun bacaan ini belum dirumuskan sebagai kriteria yang dapat diterapkan ketika klaim bersaing, sebagaimana dibahas pada subbagian sebelumnya. Implikasinya, pemusatan sumber normatif perlu dibedakan secara eksplisit dari otoritas atas klaim empiris.

Isu keempat adalah risiko reifikasi kategori. Tiga hadlarah dan tiga sistem epistemik mudah dibaca sebagai blok yang homogen, padahal masing-masing tradisi memuat keragaman internal, misalnya aliran-aliran dalam tafsir atau perbedaan

metode dalam ilmu-ilmu sosial. Implikasinya, pemetaan dominasi pada Tabel 1 perlu dipahami sebagai alat bantu analitis, bukan klasifikasi yang kaku.

Isu kelima adalah apakah integrasi yang ditawarkan benar-benar bersifat epistemologis atau berhenti pada level kelembagaan dan kurikuler. Pembahasan pada subbagian sebelumnya menunjukkan bahwa penilaian hanya dari indikator kelembagaan akan menghasilkan jawaban yang bias. Implikasinya, klaim keberhasilan paradigma perlu bertumpu pada indikator epistemik, seperti pada Tabel 4, agar kritik ini dapat diuji secara empiris.

Isu keenam adalah implementasi kelembagaan. Hambatan berupa kesiapan pengajar, kurikulum, dan kebiasaan akademik lama menunjukkan bahwa transformasi paradigma membutuhkan waktu dan proses sistematis. Karena itu, kajian ini menolak pembacaan yang menyamakan keberadaan paradigma dengan keberhasilan implementasinya. Paradigma ini lebih tepat dipandang sebagai proyek yang sedang berjalan dan terus membutuhkan elaborasi.

Tabel 5. Ringkasan Kritik: Kekuatan, Problem Epistemologis, dan Implikasi

Isu	Problem epistemologis	Implikasi bagi posisi paradigma
Abstraksi dan operasionalisasi	Relasi antardisiplin dijelaskan, tetapi prosedur penghubungan belum baku.	Kerangka epistemologis-reflektif, bukan metode siap pakai.
Dialog setara	Otoritas teks tampak bertentangan dengan kesetaraan antar-epistemologi.	Kesetaraan dipahami sebagai saling mengoreksi pada ranah masing-masing.
Pusat model dan non-hierarki	Sumber normatif di pusat berpotensi dibaca sebagai keunggulan epistemik.	Perlu pembedaan sumber nilai dari otoritas atas klaim empiris.
Reifikasi kategori	Tradisi dibaca sebagai blok homogen.	Pemetaan dominasi dipakai sebagai alat bantu analitis.
Epistemik versus kelembagaan	Keberhasilan diukur dari indikator administratif.	Penilaian memakai indikator epistemik.
Implementasi	Kesiapan pengajar dan kurikulum belum merata.	Paradigma adalah proyek yang masih berjalan.

Sumber: analisis penulis berdasarkan pembahasan pada bagian ini.

7. Relevansi dan Batas Klaim bagi Pendidikan Tinggi Islam

Relevansi paradigma ini yang paling dapat ditunjukkan dari sumber yang dikaji adalah relevansinya bagi perancangan keilmuan dan kurikulum pendidikan tinggi Islam, yaitu sebagai kerangka yang mendorong dialog antara ilmu keislaman, ilmu sosial-humaniora, dan ilmu alam (Hanifah, 2018; Rifai et al., 2014). Pada tingkat pembelajaran, kajian (Maisyanah et al., 2023) membacanya sebagai dasar paradigma baru pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Artikel ini tidak menegaskan klaim yang lebih luas yang kerap melekat pada paradigma tersebut, seperti sumbangannya terhadap Islam moderat, Islam Nusantara, kebangkitan intelektual Islam, atau transformasi pendidikan tinggi secara keseluruhan. Klaim-klaim tersebut belum didukung oleh sumber akademik spesifik dalam kajian ini maupun data empiris yang memadai. Pengakuan atas pluralitas cara mengetahui memang memiliki afinitas konseptual dengan sikap inklusif (Tajuddin et al., 2021), tetapi afinitas konseptual tidak sama dengan bukti pengaruh. Pengujian klaim-klaim itu memerlukan penelitian empiris tersendiri, misalnya studi dampak pada mahasiswa dan lulusan.

8. Tawaran Konseptual: Operasionalisasi Paradigma bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Luar Jawa

Paradigma integrasi-interkoneksi tumbuh dari konteks UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Perguruan tinggi keagamaan Islam di luar Jawa memiliki konteks sosial-keagamaan yang berbeda sehingga membutuhkan operasionalisasi yang kontekstual, Aceh dapat menjadi ilustrasi. Provinsi ini dikenal memiliki tradisi pendidikan dayah serta pelembagaan syariat Islam dalam tata pemerintahan daerah, dan UIN Ar-Raniry berada di tengah konteks tersebut. Tawaran berikut disusun sebagai kerangka

Konseptual tiga tahap, yaitu *petakan-hubungkan-uji*, yang bersifat hipotetis dan memerlukan pengujian empiris.

Tabel 6. Kerangka Operasionalisasi Petakan-Hubungkan-Uji dan Ilustrasi Konteks Aceh

Tahap	Langkah	Ilustrasi konteks Aceh (hipotetis)
1. Petakan	Memetakan basis epistemik lokal ke dalam tiga hadlarah dan lapisan jaring laba-laba.	Tradisi pengajian kitab di dayah dipetakan pada hadlarah al-nash; praktik spiritual dan adat pada dimensi irfani; riset kebencanaan dan sosial pada hadlarah al-'ilm.
2. Hubungkan	Menghubungkan lapisan kedua dan ketiga dengan isu lokal pada lapisan keempat dalam satu desain pembelajaran atau penelitian.	Isu kebencanaan: tafsir dan hadis tentang bencana (lapisan 2) dibaca bersama antropologi dan sosiologi (lapisan 3) untuk merancang pembelajaran literasi mitigasi (lapisan 4).
3. Uji	Menilai hasil dengan indikator epistemik pada Tabel 5, bukan hanya indikator kelembagaan.	Penilaian terhadap capaian pembelajaran, desain riset, dan praktik dosen pada mata kuliah atau program yang dirancang pada tahap 2.

Sumber: rancangan konseptual penulis; belum diuji secara empiris.

Ilustrasi kebencanaan dipilih karena menunjukkan bagaimana tiga hadlarah bekerja pada satu isu: teks keagamaan memberi kerangka nilai, ilmu sosial menjelaskan konteks sosial dan budaya masyarakat terdampak, dan ilmu kebencanaan menyediakan pengetahuan teknis mitigasi. Kerangka ini juga dapat diterapkan pada lembaga pendidikan lain, termasuk madrasah dan program pendidikan agama Islam, misalnya dengan menghubungkannya pada desain pembelajaran seperti yang dibahas (Maisyanah et al., 2023), serta pada instansi pemerintah daerah yang menangani isu yang beririsan dengan keagamaan. Karena kerangka ini belum diuji, ia diajukan sebagai hipotesis kerja yang dapat dikembangkan melalui studi kasus di perguruan tinggi keagamaan Islam di luar Jawa.

D. KESIMPULAN

Pertama, bahwa paradigma integrasi-interkoneksi M. Amin Abdullah lahir dari lintasan intelektual yang memadukan tradisi teks keislaman, filsafat, dan studi agama, serta dari diagnosis bahwa dikotomi ilmu merupakan persoalan epistemologis yang tampak dalam ketegangan antara normativitas dan historisitas.

Kedua, tipologi bayani-burhani-irfani dan tiga *hadlarah* (*al-nash, al-'ilm*, dan *al-falsafah*) saling berhubungan tetapi tidak identik: yang pertama mengklasifikasikan sistem epistemik, yang kedua mengklasifikasikan tradisi keilmuan, dan setiap hadlarah didominasi satu sistem epistemik tetapi bersifat multiepistemik. Model jaring laba-laba menjadi peta relasi disiplin dalam empat lapisan.

Ketiga, secara epistemologis paradigma ini menerima pluralitas kriteria kebenaran yang bekerja pada ranah berbeda, yaitu otoritas dan penafsiran teks, verifikasi empiris, dan koherensi intersubjektif. Kemungkinan penerapannya kuat ketika tiga hadlarah menjawab pertanyaan berbeda tentang objek yang sama, tetapi paradigma ini belum menyediakan aturan keputusan bagi klaim yang bersaing pada pertanyaan yang sama.

Keempat, kronologi alih status (UIN Jakarta 2002, UIN Sunan Kalijaga dan UIN Malang 2004, UIN Ar-Raniry 2013) dan keragaman model integrasi menunjukkan bahwa paradigma ini tidak dapat diperlakukan sebagai dasar seluruh transformasi IAIN menjadi UIN. Ia lebih tepat dipandang sebagai model integrasi yang berpengaruh di UIN Sunan Kalijaga, dan dampaknya perlu dinilai melalui indikator epistemik, bukan semata dari pembukaan program studi umum.

Secara konseptual, artikel ini menawarkan kerangka petakan-hubungkan-uji bagi perguruan tinggi keagamaan Islam di luar Jawa dengan ilustrasi konteks Aceh. Karena kajian ini bersifat kepustakaan, kerangka tersebut belum diuji secara empiris, dan klaim mengenai pengaruh paradigma pada moderasi beragama maupun wacana lain belum dibuktikan. Penelitian lanjutan disarankan untuk: Pertama, menelusuri dokumen kebijakan dan naskah akademik alih status IAIN menjadi UIN guna menguji difusi paradigma secara dokumenter; Kedua, melakukan studi kasus di perguruan tinggi keagamaan Islam di luar Jawa untuk menguji indikator epistemik pada Tabel 4; Ketiga, membandingkan paradigma Abdullah dengan model integrasi di UIN lain secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. (1996). *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Cet. 1). Pustaka Belajar.

Abdullah, M. A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (M. A. Abdushomad, Ed.). Pustaka Belajar.

Abdullah, M. A. (2015). Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, *52*(1), 175. https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203

Abdullah, M. A. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer* (A. Khoirudin, Ed.; Cet. 2). IB Pustaka.

Adib, M. A. (2022). Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, *7*(2), 87. https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11665

Afrizal, A. (2022). Perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia (Kasus STAIN, IAIN, UIN dan Perguruan Tinggi Islam). *Berkala Ilmiah Pendidikan*, *2*(1), 18–32. https://doi.org/https://doi.org/10.51214/bip.v2i1.282

Anwar, S. (2021). Integrasi Keilmuan Perspektif M. Amin Abdullah dan Imam Suprayogo. *Jurnal Ilmiah Pedagogy*, *14*(1), 142–165.

Arbi, A., Herlina, H., & Syarifuddin, S. (2024). Mendamaikan Islam dan Sains: Studi Integrasi Interkoneksi Ilmu di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Bengkalis. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, *10*(2), 307. https://doi.org/10.24014/potensia.v10i2.33493

Bigliardi, S. (2012). Barbour's Typologies and The Contemporary Debate on Islam and Science. *Zygon: Journal of Religion and Science*, *47*(3). https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2012.01269.x

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Fauzima, A. M., & Irsyadunnas, I. (2026). Integrasi-Interkoneksi: Menilik Filosofi Jaring Laba-Laba Sebagai Sains Islam Kontemporer. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, *6*(2), 27389–27395. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.9873

Fian, K., & Hidayat, F. (2023). Paradigm of Integration-Interconnection: M. Amin Abdullah and Mehdi Golshani's Perspective. *FIKRAH*, *11*(2), 281.

https://doi.org/10.21043/fikrah.v11i2.19125

Hanifah, U. (2018). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer (Konsep Integrasi Keilmuan di Universitas-Universitas Islam Indonesia. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, *13*(2). https://doi.org/10.19105/tjpi.v13i2.1972

Hasan, M., Sardar, Z., & Al-Amin, K. (2023). Evaluasi Implementasi Model Integrasi Keilmuan di UIN se-Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, *7*(2), 89–115. https://doi.org/https://doi.org/10.35316/jpii.v7i2.564

Hidayatullah, U. S. (n.d.). *No Title*. History. Retrieved https://uinjkt.ac.id/en/history

Ibrahim, L. (2015). Evaluasi Implementasi Kebijakan Perubahan Status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN. *Kompetensi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, (3).

Izudin, A. (2015). Paradigma Integrasi-Interkoneksi: Analisis Epistemologi Pemikiran Keislaman M. Amin Abdullah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, *4*(1), 103–122. https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/96

Kalijaga, U. S. (n.d.). *UIN Sunan Kalijaga*. History. Retrieved https://uin-suka.ac.id/en/page/detail/73/history

Kuhn, T. S. (2012). *The Structure of Scientific Revolutions*. The University of Chicago Press.

Maisyanah, M., Fuad, A. Z., Bakar, M. Y. A., & Mahmud, A. (2023). New Paradigm of Learning Islamic Religious Education in the 21st Century: a Study of Amin Abdullah's Thought. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, *18*(1), 117. https://doi.org/10.21043/edukasia.v18i1.19209

Mas'ud, A. (2002). *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*. Gama Media.

Masyitoh, D. (2020). Amin Abdullah dan Paradigma Integrasi-Interkoneksi. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, *4*(1), 81. https://doi.org/10.30595/jssh.v4i1.5973

Munirah, M. (2021). Dikotomi Ilmu dalam Pendidikan Islam: Akar Masalah dan Solusi Alternatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, *10*(2), 143–158. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.13852

Munthe, K. B. (2022). Integrasi Ilmu terhadap Transformasi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia (PTAIN, ADIA, IAIN, STAIN dan UIN). *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, *1*(1), 386–399. https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS

Nusi, A. (2021). Dikotomi Pendidikan Islam dan Umum: Telaah Pemikiran Integrasi-Interkoneksi M. Amin Abdullah. *Irfani: Jurnal Pendidikan Islam*, *17*(1).

Rahmani, D. A., Najmi, V. N., & Dewi, E. (2026). Reconstructing Islamic Epistemology: A Philosophical Analysis of Amin Abdullah's Integrative–Interconnected Paradigm. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, *11*(1), 169–182. https://doi.org/10.25299/althariqah.2026.vol11(1).27798

Rifai, N., Fauzan, F., & Bahrissalim, B. (2014). Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, *1*(1), 13–34. https://doi.org/10.15408/tjems.v1i1.1108

Rouf, A. M. (2018). *Kritik Nalar Arab Muhammad 'Abid Al-Jabiri* (C. Wahyudi, Ed.; Cetakan 1). Lkis.

Siswanto, S. (2013). Perspektif Amin Abdullah tentang Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Islam. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, *3*(2), 376. https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.376-409

Tajuddin, T., Tabrani, T., & Muthiatul Awwaliyah, N. (2021). Paradigma Integrasi-Interkoneksi Islamisasi Ilmu dalam Pandangan Amin Abdullah. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *1*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.47134/aksiologi.v1i2.14

Waston, W. (2016). Pemikiran Epistemologi Amin Abdullah dan Relevansinya bagi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *17*(01), 80–89. https://doi.org/10.23917/profetika.v17i01.2102

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.